

---

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENDEKATAN ABCD UNTUK MENCAPAI SDG 1: TANPA KEMISKINAN

Fachrul Najamudin<sup>1</sup>, Adam  
Hafidz Al Fajar<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Article history

Received: 07 November 2024

Revised : 13 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

\*Corresponding author Email :  
23202032008@student.uin-suka.ac.id

No. doi: 10.24198/focus.v7i2.58936

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1, yaitu penghapusan kemiskinan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, peneliti menggunakan Google Scholar untuk mengumpulkan literatur relevan, mencakup analisis ABCD, studi kasus, dan kontribusinya terhadap SDG 1. Data diolah melalui langkah-langkah dengan teori Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) adalah metode pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goal (SDG) 1, yaitu tanpa kemiskinan. Pendekatan ABCD mengutamakan pemanfaatan aset lokal yang dimiliki oleh komunitas, seperti sumber daya alam, keterampilan individu, jaringan sosial, dan kearifan lokal

**Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, SDG 1, Sumber Daya Lokal**

### ABSTRACT

*This study explores how community empowerment based on local resources through the Asset-Based Community Development (ABCD) approach can support the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 1, which is poverty eradication. The researcher employed a qualitative method with a literature review approach, utilizing Google Scholar to gather relevant literature, including analyses of ABCD, case studies, and its contributions to SDG 1. Data were processed through steps based on Miles and Huberman's theory, encompassing data reduction, presentation, and systematic conclusion drawing. The findings of this study conclude that the Asset-Based Community Development (ABCD) approach is an effective method for community empowerment in addressing poverty and supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 1: no poverty. The ABCD approach emphasizes utilizing local community assets, such as natural resources, individual skills, social networks, and local wisdom.*

*Keywords: Community Empowerment, SDG 1, Local Resources*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah masalah yang masih dihadapi oleh banyak negara, khususnya di negara berkembang (Febrianti, 2024). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun angka kemiskinan masih menunjukkan angka yang signifikan, terutama di daerah pedesaan dan komunitas marginal (Rini, 2012). Adapun Berdasarkan data pusat statistik perbulan Maret 2024 presentase penduduk kemiskinan di Indonesia sebesar 9.03% dengan jumlah penduduk 25.22 juta orang. Adapun garis kemiskinan masyarakat di Indonesia Rp582.932,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,- (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,- (25,56 persen) (Statistik, 2024). Persoalan kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga terkait dengan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Winarti & Purwanti, 2014). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah Asset Based Community Development (ABCD), yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmawati et al., 2024).

Pendekatan ABCD berfokus pada pengidentifikasian dan pemberdayaan aset yang ada dalam suatu komunitas, baik itu berupa sumber daya alam, kearifan lokal, keterampilan masyarakat, maupun jaringan sosial yang ada (Habib, 2021). Pendekatan ini berusaha memanfaatkan kekuatan

internal komunitas untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks SDG 1, yang berfokus pada penghapusan kemiskinan, pendekatan ABCD dapat menjadi alternatif yang efektif, karena mengarah pada pemberdayaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Masalah yang muncul adalah meskipun pendekatan ABCD sudah cukup dikenal, penerapannya dalam konteks pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang rawan kemiskinan, belum banyak terdokumentasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui ABCD dapat mendukung pencapaian SDG 1 menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ABCD dapat diimplementasikan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan dampak positif bagi komunitas yang terpinggirkan.

Pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Alfiana et al., 2023). Salah satu alasan pentingnya penelitian ini adalah bahwa banyak program pemberdayaan yang hanya berfokus pada bantuan luar tanpa memanfaatkan potensi yang sudah ada dalam komunitas itu sendiri. Pendekatan ABCD menawarkan suatu cara yang berbeda dengan memusatkan perhatian pada kekuatan internal komunitas, yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai kesejahteraan. Kemiskinan dapat diperburuk oleh ketergantungan

masyarakat terhadap bantuan eksternal yang tidak berkelanjutan. Dalam hal ini, ABCD berusaha menciptakan solusi yang lebih otonom, dimana komunitas dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, mulai dari potensi alam, keahlian lokal, hingga jaringan sosial yang ada (Rahmadanira, 2023).

Pendekatan ini mengedepankan konsep keberlanjutan, di mana masyarakat diberikan kapasitas untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada dengan cara yang lebih mandiri. Dengan demikian, proses pemberdayaan ini dapat mempercepat pencapaian SDG 1, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Selain itu, dengan mengoptimalkan potensi lokal, pendekatan ABCD juga berperan dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kerentanannya terhadap berbagai ancaman, baik itu bencana alam, krisis ekonomi, maupun ketidakstabilan sosial. Penelitian ini relevan untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis pada kekuatan lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis sumber daya lokal memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan. Adapun menurut Kretzmann dan McKnight dalam Adji et al., (2024) yang memperkenalkan konsep ABCD mengungkapkan bahwa ketika komunitas dapat mengenali dan mengoptimalkan aset-aset lokal mereka, maka mereka dapat mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi secara lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui ABCD mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri dalam mengelola berbagai aspek kehidupan mereka. Lebih lanjut, penelitian oleh Moser, (2006) tentang "Asset-Based Approaches to Poverty Reduction in a Globalized Context" menemukan bahwa pendekatan berbasis aset dapat mempercepat proses

pemberdayaan dengan cara mengidentifikasi kekuatan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, dan mengembangkan ketahanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini mendukung gagasan bahwa pemberdayaan berbasis sumber daya lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Adapun menurut Narayan-Parker & Patel, (2000) dalam "Voices of the poor : Can Anyone hear us?" menunjukkan bahwa masyarakat yang dapat mengakses dan mengelola aset mereka sendiri memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Dalam konteks ini, pendekatan ABCD memiliki peran penting dalam membangun kapasitas masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang ada, baik itu dalam bentuk sumber daya alam, keahlian, maupun jaringan sosial. Namun, meskipun pendekatan ABCD telah terbukti efektif dalam beberapa konteks, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di beberapa wilayah, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih mendalami bagaimana penerapan ABCD dapat disesuaikan dengan kondisi lokal untuk lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di berbagai konteks sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 1, yaitu penghapusan kemiskinan

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD).

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang membahas penerapan ABCD dalam konteks penghapusan kemiskinan. Peneliti menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar untuk menemukan literatur yang relevan. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi yang digunakan.

Literatur yang terkumpul mencakup analisis teoretis, studi kasus, dan laporan praktik penerapan ABCD di berbagai komunitas. Data yang diperoleh memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan ABCD dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan aset lokal. Aspek-aspek yang ditelaah meliputi konsep dasar ABCD, penerapan dalam berbagai konteks sosial-ekonomi, kontribusinya terhadap penghapusan kemiskinan, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, analisis juga mencakup kontribusi pendekatan ini dalam mencapai tujuan SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan.

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Huberman, 1992). Pada tahap reduksi data, informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur disaring dan dipilih untuk mempertahankan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan atau berulang dihapus untuk menjaga fokus analisis. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Penyajian data ini memfasilitasi identifikasi pola-pola tematik, seperti hubungan antara aset lokal dan

pemberdayaan masyarakat atau dampak pendekatan ABCD terhadap pencapaian SDG 1.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti mengidentifikasi hubungan-hubungan utama dan kesimpulan yang muncul dari data yang telah dianalisis. Proses ini melibatkan pengujian ulang data yang telah disajikan untuk memastikan konsistensi dan validitas kesimpulan yang diambil. Hasil dari berbagai literatur dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Temuan-temuan ini kemudian dirumuskan dalam narasi yang menjelaskan relevansi pendekatan ABCD dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung penghapusan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan menggunakan metode ini, studi literatur memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas pendekatan ABCD dalam menciptakan solusi yang mandiri dan berkelanjutan untuk komunitas, sementara pendekatan analisis Miles dan Huberman memastikan bahwa data dikelola secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang terstruktur dan valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Pendekatan ABCD dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Penerapan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam pemberdayaan masyarakat berfokus pada pemanfaatan potensi yang ada di dalam komunitas itu sendiri (Riyanti & Raharjo, 2021). Alih-alih hanya mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang ada, ABCD menekankan pentingnya mengenali dan mengoptimalkan aset-aset lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa setiap komunitas memiliki sumber daya yang dapat digali dan diberdayakan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat lebih mampu mengatasi

tantangan mereka sendiri dengan memberdayakan apa yang mereka miliki, baik berupa sumber daya alam, keterampilan, pengetahuan, maupun hubungan sosial.

Konsep dasar dari ABCD pertama kali diperkenalkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann pada awal 1990-an (McKnight, 2017). Mereka berpendapat bahwa pemberdayaan yang efektif harus dimulai dengan identifikasi aset, bukan masalah. Berbeda dengan pendekatan pembangunan tradisional yang berfokus pada kekurangan atau kebutuhan, ABCD mengajak masyarakat untuk melihat dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam komunitas. Pendekatan ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan, memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi masalah secara mandiri, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan (Ayuni & Anshori, 2024).

Pendekatan ABCD juga berperan besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan eksternal (Bela et al., 2024). Adapun bantuan luar yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya bersifat sementara dan tidak menghasilkan perubahan yang tahan lama. Dalam ABCD, masyarakat diajak untuk memanfaatkan potensi internal mereka, baik itu berupa keterampilan individu, sumber daya alam, atau jaringan sosial yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini membantu masyarakat untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi mereka. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan solidaritas sosial dan penguatan hubungan antar anggota masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya mereka, mereka juga dapat menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan akses ke pendidikan, dan memperkuat jaringan sosial yang ada.

Salah satu aspek penting dalam penerapan ABCD adalah inklusivitas (Sholehah & Pratama, 2024). Pendekatan ini mengajak semua elemen dalam komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ABCD memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasakan manfaat dari perubahan yang terjadi. Inklusivitas ini penting karena menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam proses pembangunan. Ketika semua anggota masyarakat terlibat, keberhasilan pembangunan menjadi lebih berkelanjutan karena semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi.

Penerapan pendekatan ABCD telah terbukti berhasil di berbagai negara dengan konteks yang berbeda. Di Kenya, komunitas-komunitas di kawasan kumuh telah berhasil memberdayakan diri mereka dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti lembaga-lembaga sosial, keterampilan lokal, dan jejaring sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Majale, 2008). Pendekatan ini menghindari ketergantungan pada bantuan luar dan lebih mengutamakan kekuatan internal komunitas untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam merancang solusi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Adapun berdasarkan hasil penelitian dari Leonardo Bis dos Santos (2024) yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam konteks ABCD di komunitas perkotaan dan favelas di Brasil bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia, menghasilkan pendapatan, serta

melestarikan lingkungan melalui solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS). Proses pemberdayaan dimulai dengan mengidentifikasi aset komunitas, seperti pengetahuan lokal, keterampilan, dan sumber daya alam, untuk dioptimalkan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif anggota komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proyek yang dijalankan.

Pertukaran pengalaman antar komunitas juga menjadi bagian penting, memungkinkan pembelajaran dari praktik terbaik yang sudah diterapkan. Hal ini memperkuat jaringan sosial dan kolaborasi antar anggota masyarakat. Implementasi NbS meliputi inisiatif seperti kebun kota, pariwisata berbasis komunitas, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk pengelolaan sumber daya alam. Dampak positifnya meliputi peningkatan kesehatan melalui akses ke ruang hijau, peningkatan pendapatan melalui pariwisata komunitas dan pertanian perkotaan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, proses pemberdayaan ini juga membantu meningkatkan visibilitas sosial komunitas yang terpinggirkan, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Secara keseluruhan, pemberdayaan berbasis ABCD tidak hanya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan di wilayah perkotaan dan favelas.

Di Indonesia, salah satu contoh keberhasilan penerapan ABCD terlihat pada Kampung Naga di Jawa Barat, di mana masyarakat menggunakan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan. Masyarakat Kampung Naga tidak hanya bergantung pada bantuan

eksternal, tetapi memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka dalam bertani dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan lingkungan yang ada (Paramitha & Bhaskara, 2020).

Penerapan ABCD dalam pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kemandirian masyarakat. Dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki, masyarakat dapat menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini memperkuat solidaritas sosial dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Keberhasilan penerapan ABCD di berbagai negara membuktikan bahwa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

### **Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal**

Aset komunitas dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya identifikasi dan pemanfaatan segala jenis sumber daya yang dimiliki oleh komunitas (Wibhisana, 2021). Aset-aset ini dapat berupa aset fisik, manusia, dan sosial, yang semuanya saling terkait dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat melalui aset-komunitas bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada dalam komunitas tersebut,

mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat mengurangi kemiskinan.

Aset fisik merupakan sumber daya yang nyata dan dapat diukur, seperti tanah, air, kekayaan alam, dan infrastruktur yang ada di dalam suatu komunitas (Rahman et al., 2022). Adapun tanah dapat digunakan untuk bertani atau membuka usaha berbasis agribisnis. Sumber daya alam, seperti hutan atau sungai, dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata atau produk-produk berbasis alam, yang jika dikelola dengan baik, bisa memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang ada, meskipun terbatas, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti pasar, transportasi, dan fasilitas publik lainnya.

Aset manusia berfokus pada kapasitas individu dalam komunitas, termasuk keterampilan, pengetahuan, serta pengalaman yang mereka miliki (Mahmudah, 2018). Aset ini sangat penting karena memberikan dasar bagi kemampuan komunitas untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Seperti keterampilan bertani, menjahit, atau mengolah hasil alam dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuka usaha lokal, atau meningkatkan produktivitas pertanian. Pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat juga bisa menjadi kunci untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan lokal (Kristiyanto, 2017). Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keterampilan dapat memperkuat aset manusia ini dan membantu masyarakat untuk bersaing dalam dunia ekonomi yang lebih luas (Sudarsana, 2015). Aset sosial mencakup jaringan sosial yang ada di dalam komunitas, termasuk hubungan antar individu, kelompok, organisasi masyarakat, dan kelembagaan lokal. Kekuatan jaringan sosial ini menjadi faktor penting dalam

keberhasilan pemberdayaan komunitas. Organisasi masyarakat sipil atau kelompok-kelompok masyarakat dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak luar, sebagaimana pemerintah, lembaga donor, atau sektor swasta. Jaringan ini juga membantu membangun solidaritas sosial dan mempermudah distribusi informasi serta pengorganisasian komunitas. Adapun jika jaringan sosial ini dikelola dengan baik, ia bisa menjadi aset yang sangat kuat dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, komunitas harus mengembangkan strategi yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai sektor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan LSM. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya lokal, seperti memberikan akses ke pendidikan, pelatihan, dan modal usaha. Pemerintah juga dapat menciptakan infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan transportasi atau pasar lokal, yang dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal. Selain itu, kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana juga sangat penting.

Sektor swasta dapat memberikan kontribusi melalui investasi, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), atau penciptaan lapangan kerja di sektor yang memanfaatkan sumber daya lokal (Apip Alansori & Erna Listyaningsih, 2020). Perusahaan swasta juga dapat mengembangkan model bisnis yang melibatkan masyarakat dalam rantai pasokan mereka, baik dalam sektor pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada. Organisasi non-pemerintah (LSM) juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat (Rizky, 2017). LSM dapat memberikan pelatihan,

penyuluhan, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan aset lokal. Selain itu, LSM juga dapat berperan dalam memfasilitasi kolaborasi antara berbagai sektor, serta menyediakan akses kepada sumber daya eksternal yang tidak tersedia melalui sektor publik atau swasta.

Keberhasilan dalam memanfaatkan aset lokal dapat dilihat pada berbagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana komunitas berhasil mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis aset. Sebagaimana hasil penelitian oleh Shetty & Abhishek (2024) yang menunjukkan bahwa desa di India, komunitas berhasil meningkatkan pendapatan mereka dengan mengembangkan usaha pertanian berbasis agroforestri. Dengan memanfaatkan tanah mereka, yang sebelumnya terbengkalai, komunitas mulai menanam berbagai jenis tanaman yang dapat meningkatkan hasil pertanian serta melestarikan lingkungan. Selain itu, mereka juga menggali pengetahuan lokal mengenai teknik pertanian yang ramah lingkungan. Melalui pelatihan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal, mereka berhasil mengoptimalkan sumber daya alam mereka, meningkatkan hasil pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia, sebuah contoh keberhasilan lain dapat dilihat pada program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di desa-desa yang mengandalkan kerajinan tangan dan produk-produk lokal. Sebagaimana hasil pengabdian masyarakat oleh Parwata et al., (2023) yang menunjukkan bahwa di Bali, pengrajin lokal berhasil mengembangkan usaha kerajinan tangan dengan bantuan organisasi masyarakat dan sektor swasta. Mereka memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota komunitas, serta akses pasar yang dibangun melalui jaringan sosial dan organisasi lokal. Hasilnya, mereka dapat meningkatkan pendapatan secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, dan

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Penerapan pendekatan pemberdayaan berbasis aset-komunitas ini sangat relevan dengan tujuan SDG 1, yaitu mengakhiri kemiskinan di semua bentuk dan dimensi di seluruh dunia. Dengan mengoptimalkan aset lokal, komunitas dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini tidak hanya mendorong keberlanjutan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan solidaritas dalam komunitas, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

### **Peran Kearifan Lokal dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi**

Kearifan lokal mempunyai peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi di masyarakat, khususnya dalam upaya mengatasi kemiskinan (Nindatu, 2019). Tradisi, budaya, dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh suatu komunitas mengandung nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana suku Moi yang tinggal di wilayah Papua Barat, Indonesia, memiliki berbagai bentuk kearifan lokal yang berperan penting dalam memberdayakan masyarakat mereka. Kearifan lokal ini berhubungan erat dengan cara mereka hidup, memanfaatkan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial (H Hermanto Suaib, 2017). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, kearifan lokal tidak hanya menjadi landasan untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan SDG 1, yaitu menghapuskan kemiskinan di semua bentuknya di seluruh dunia.

Kearifan lokal yang terkait dengan aspek tradisi dan budaya biasanya mencakup sistem nilai, norma, dan pengetahuan yang telah berkembang di dalam komunitas selama bertahun-tahun (Hidayat, 2021). Pengetahuan lokal ini diteruskan secara turun-temurun dan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi (Rusmaniah et al., 2022). Adapun pengetahuan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan sudah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana masyarakat adat di Indonesia, seperti suku Dayak di Kalimantan, memiliki sistem pertanian yang berfokus pada rotasi tanaman dan pemeliharaan hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka tidak hanya bergantung pada pertanian konvensional, tetapi juga memiliki pemahaman yang dalam mengenai penggunaan tanaman obat, pengelolaan hutan, dan sistem berburu yang memberikan manfaat ekonomi sambil menjaga kelestarian alam (Riyanto & Adon, 2024). Pendekatan ini lebih berkelanjutan daripada metode pertanian modern yang cenderung merusak lingkungan dan sumber daya alam.

Selain aspek pertanian, kearifan lokal dalam bidang kerajinan tangan dan seni juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi. Banyak komunitas di seluruh dunia yang mengandalkan keterampilan tangan tradisional untuk menciptakan barang-barang bernilai ekonomi, seperti kerajinan dari anyaman bambu, tenun, atau batik. Kerajinan ini tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikembangkan dan dipasarkan dengan baik (Raharjo, 2011). Adapun contohnya terletak di Bali, Indonesia, di mana kerajinan tangan yang berbasis pada budaya lokal telah berhasil menjadi komoditas ekspor yang menggerakkan ekonomi lokal (Sopanah et al., 2020). Komunitas yang terlibat dalam produksi kerajinan ini memperoleh

penghasilan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Bukti empiris mengenai keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dapat ditemukan dalam berbagai studi kasus di seluruh dunia. Salah satunya di Kenya, yang mana model pemberdayaan berbasis kearifan lokal telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam melalui program yang disebut "Community Forest Associations" (CFA). Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka tentang kehutanan. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penjualan produk-produk hutan yang dikelola secara berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, program ini juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan, dengan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya mengandalkan penghidupan dari aktivitas yang merusak lingkungan (Koech et al., 2009). Adapun hal ini juga terletak di negara India yang mana menunjukkan keberhasilan pemberdayaan berbasis kearifan lokal datang dari wilayah pedesaan, khususnya melalui inisiatif yang menggabungkan pengetahuan lokal dengan teknologi modern. Dalam program "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act" (MGNREGA), yang memberikan kesempatan kerja di daerah pedesaan, banyak desa berhasil mengintegrasikan metode pertanian tradisional dengan sistem irigasi modern yang didukung oleh pengetahuan lokal. Misalnya, di Rajasthan, masyarakat menggunakan pengetahuan lokal tentang sumber daya air untuk membangun sistem penampungan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan mereka. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa pendekatan

berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, dengan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan (Nair et al., 2013).

Dalam konteks SDG 1 yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu kunci dalam pencapaian tujuan tersebut. Dengan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya yang sudah ada, mereka dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan, mandiri, dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagai kesimpulan, penerapan kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas terhadap berbagai tantangan global. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam setiap komunitas, yang sesuai dengan prinsip-prinsip SDG 1 dalam menghapuskan kemiskinan.

### **Keberhasilan dan Tantangan dalam Penerapan ABCD Dalam Menjalankan Program SDG 1**

Penerapan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pengentasan kemiskinan telah memberikan berbagai hasil positif di berbagai komunitas, namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan (Hanafi, 2015). ABCD berfokus pada pemanfaatan aset-aset yang sudah ada dalam komunitas, baik itu aset fisik, manusia, sosial, maupun ekonomi, untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Riyanti & Raharjo, 2021). Dalam konteks SDG 1, yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam segala bentuknya, pendekatan ABCD memiliki potensi besar

untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, ada pula tantangan yang harus dihadapi dalam penerapannya.

Salah satu keberhasilan yang dapat dilihat dalam penerapan ABCD adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi komunitas melalui pengembangan aset lokal (Habib, 2021). Banyak studi kasus yang menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki, mereka mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, di daerah pedesaan di beberapa negara berkembang, penerapan ABCD berfokus pada pengembangan keterampilan lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Komunitas yang sebelumnya bergantung pada bantuan luar negeri atau pekerjaan informal, dapat beralih ke bentuk usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Sebagaimana di daerah Afrika Sub-Sahara, beberapa komunitas berhasil meningkatkan pendapatan mereka melalui pengelolaan aset pertanian dan kehutanan yang berbasis pada pengetahuan lokal (Mohammed et al., 2013). Adapun di Kenya, program pemberdayaan yang mengimplementasikan prinsip ABCD dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan dan pertanian, menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga, memperbaiki ketahanan pangan, dan menciptakan lapangan kerja baru (Chinyowa et al., 2017). Pendekatan ini telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut, sesuai dengan tujuan SDG 1 untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya.

Meski penerapan ABCD menunjukkan keberhasilan dalam banyak kasus, terdapat pula berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas dalam menerapkan pendekatan ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki

oleh banyak komunitas (Mutaqin et al., 2023). Meskipun ABCD berfokus pada pemanfaatan aset lokal, masyarakat tidak memiliki cukup modal atau sumber daya fisik untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Tanah yang subur, mata air dan air terjun yang merupakan sumber daya alam yang melimpah, atau keterampilan tertentu tersedia, tetapi kurangnya akses terhadap teknologi, pendidikan, atau modal kerja menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan aset tersebut secara maksimal. Selain itu, tantangan juga datang dari kapasitas masyarakat itu sendiri. Meskipun teori ABCD mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kenyataannya tidak semua komunitas memiliki kapasitas atau keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan aset mereka dengan efektif. Beberapa komunitas kurang memiliki pengetahuan dalam hal pengelolaan bisnis, pemasaran produk, atau pengelolaan keuangan, yang dapat menghambat upaya mereka untuk memanfaatkan aset lokal secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan penguatan kapasitas kepada masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah hambatan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan akses pasar. Misalnya, meskipun komunitas di beberapa daerah memiliki produk lokal yang potensial, mereka tidak memiliki akses yang cukup ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau ketidakmampuan dalam menyediakan infrastruktur yang memadai juga menjadi penghalang besar. Di beberapa negara berkembang, ketidakpastian kebijakan terkait agribisnis atau sektor informal dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk berinvestasi dalam pengembangan aset mereka. Hambatan eksternal lainnya adalah pengaruh ekonomi global yang dapat merusak upaya pengembangan berbasis

aset lokal. Ketika pasar global didominasi oleh produk impor atau industri besar, produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat sulit bersaing. Hal ini dapat mengurangi pendapatan yang dapat diperoleh dari produk lokal dan menghambat pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan yang diharapkan melalui pendekatan ABCD.

Meskipun tantangan-tantangan ini ada, penerapan pendekatan ABCD untuk pengentasan kemiskinan tetap memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan SDG 1. Keberhasilan yang dicapai di berbagai wilayah menunjukkan bahwa dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan aset yang mereka miliki, kemiskinan dapat dikurangi dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, untuk memaksimalkan potensi ABCD, perlu ada dukungan yang lebih besar dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan terkait sumber daya, kapasitas, dan hambatan eksternal. Penting untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan, serta memastikan akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan berbasis komunitas dan keberlanjutan ekonomi lokal sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi penerapan ABCD. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, diharapkan penerapan ABCD dapat lebih efektif dalam mencapai SDG 1, yaitu menghapuskan kemiskinan di semua bentuknya.

#### **Rekomendasi untuk Penerapan ABCD dalam Konteks Pengentasan Kemiskinan**

Penerapan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pengentasan kemiskinan telah memberikan banyak wawasan mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada potensi yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Dalam konteks pengentasan

kemiskinan, ABCD menawarkan solusi yang tidak hanya berfokus pada bantuan eksternal, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya lokal, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun sosial. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan peran aktif dalam pembangunan, yang dapat memperkuat ketahanan mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar. Meski demikian, penerapan ABCD dalam berbagai komunitas tidaklah tanpa tantangan, dan untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan berbagai rekomendasi dan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat itu sendiri.

Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan kapasitas komunitas dalam mengelola dan mengembangkan aset lokal mereka. Pendidikan dan pelatihan yang tepat sangat penting untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat memanfaatkan aset yang ada secara optimal. Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha berbasis komunitas. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat akan lebih mandiri dalam mengelola sumber daya mereka, yang pada gilirannya akan membantu mereka meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Untuk itu, penting bagi kebijakan pemerintah untuk mendukung penyediaan fasilitas pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung penerapan ABCD sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pemberdayaan. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi sektor swasta

yang berinvestasi dalam komunitas lokal, misalnya dengan menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal, memberikan bantuan modal usaha, atau menyediakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UKM). Sebaliknya, sektor swasta dapat membantu menyediakan pelatihan keterampilan dan mentransfer teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis aset lokal. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dapat memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya mereka dengan lebih baik.

Rekomendasi lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan akses terhadap pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh komunitas. Akses pasar menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh banyak komunitas dalam memasarkan produk lokal mereka. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang dapat memfasilitasi akses pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang mendukung promosi produk lokal, baik melalui pameran, pengembangan pasar digital, atau melalui pembentukan jaringan distribusi yang menghubungkan produk lokal dengan pasar yang lebih luas. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa produk lokal memiliki standar yang tinggi sehingga dapat bersaing dengan produk dari luar. Pelatihan dalam hal pemasaran, branding, dan pengemasan produk juga diperlukan agar produk yang dihasilkan dapat memiliki daya tarik di pasar. Selanjutnya, kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan juga sangat penting untuk penerapan ABCD yang berhasil. Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Pendekatan ini dapat mencakup penggunaan teknik

pertanian organik, pengelolaan hutan berkelanjutan, atau pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa ada kebijakan yang mendorong pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta memberikan dukungan bagi inisiatif-inisiatif yang mengintegrasikan konservasi dengan pemberdayaan ekonomi. Salah satu contoh adalah pengembangan pertanian berbasis agroforestry yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Inisiatif semacam ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan jaringan sosial dan kapasitas sosial masyarakat juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam penerapan ABCD. Aset sosial, seperti jaringan sosial, kepercayaan, dan solidaritas di antara anggota komunitas, sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong terciptanya ruang-ruang dialog dan kolaborasi antarwarga dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek pemberdayaan. Organisasi masyarakat atau kelompok lokal yang sudah ada, seperti kelompok tani, kelompok wanita, atau kelompok usaha kecil, perlu diperkuat dengan dukungan teknis dan finansial. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal akan memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola proyek yang dapat mengurangi kemiskinan.

Tak kalah penting, penerapan prinsip-prinsip inklusivitas dalam program pemberdayaan sangat perlu diperhatikan. Setiap kebijakan atau program yang dirancang harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal, terutama kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, kelompok difabel, atau kelompok marginal lainnya. Untuk itu, strategi pemberdayaan harus

memperhatikan keberagaman dalam masyarakat dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota komunitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program-program yang mengutamakan pemberdayaan perempuan, misalnya, dapat membantu menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, karena perempuan memiliki peran kunci dalam perekonomian keluarga dan komunitas.

Dalam hal ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk menciptakan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih inklusif. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan, misalnya dengan memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sumber daya keuangan. Selain itu, perlu ada kebijakan yang memastikan kelompok-kelompok rentan memiliki akses terhadap fasilitas publik yang memadai, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, penerapan ABCD dalam pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, dan tujuan SDG 1 untuk menghapuskan kemiskinan dapat lebih tercapai.

Secara keseluruhan, penerapan ABCD dalam pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang tepat, pemberdayaan berbasis aset dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Implikasi Penelitian terhadap Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat**

Hasil penelitian mengenai penerapan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) untuk pengentasan kemiskinan memiliki implikasi besar terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pendekatan ABCD

menekankan pemanfaatan sumber daya lokal—baik aset fisik, manusia, maupun sosial—untuk memberdayakan komunitas. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan berbasis aset lokal dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Pada tingkat lokal, kebijakan harus memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan aset lokal, serta mendukung usaha kecil berbasis komunitas. Di tingkat nasional, kebijakan harus memperluas akses pendidikan dan pelatihan, serta memberikan dukungan kepada sektor swasta dan LSM untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

### SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) adalah metode pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goal (SDG) 1, yaitu tanpa kemiskinan. Pendekatan ABCD mengutamakan pemanfaatan aset lokal yang dimiliki oleh komunitas, seperti sumber daya alam, keterampilan individu, jaringan sosial, dan kearifan lokal. Dengan menitikberatkan pada kekuatan internal komunitas, ABCD memungkinkan masyarakat untuk menjadi mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan ABCD berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai konteks, seperti di favelas Brasil atau komunitas pedesaan Indonesia, pendekatan ini berhasil meningkatkan pendapatan melalui inisiatif berbasis aset lokal, seperti pariwisata berbasis komunitas, pertanian organik, dan kebun kota. Selain itu, ABCD juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

program, menciptakan rasa kepemilikan, serta memperkuat solidaritas sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, W. S., Muttaqin, M. I., Wahyudi, D., Damayanti, I. S. A., Putri, R. A., & Masyithoh, D. D. (2024). Optimalisasi Evaluasi Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka pada Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kota Batu. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1431-1454.
- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113-7120.
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*. Penerbit Andi.
- Ayuni, R. Q., & Anshori, M. (2024). Ecobrik: Sinergi Hijau Masyarakat Lokal dan Pendatang di Krikilan Desa Kalipang Grati Pasuruan. *PROGRESIF: Jurnal Dakwah, Sosial, dan Komunikasi*, 1(2), 113-124.
- Bela, H., Annshori, M., & Marshalita, M. (2024). Asset-Based Community Development: Program Inovasi Kampung Bantar. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 61-74.
- Chinyowa, K. C., Sirayi, M., & Mokuku, S. (2017). From Needs-Based to Asset-Based Community Development: The ABCD Method as an Effective Strategy for Engaging with Grassroots Leaders in South Africa. In *Grassroots Leadership and the Arts for Social Change* (Vol. 3, hal. 223-237). Emerald Publishing Limited.
- Febrianti, E. (2024). Implikasi Globalisasi Dan Kemiskinan di Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 145-154.
- H Hermanto Suaib, M. M. (2017). *Suku Moi: nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat*.

- AnImage.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82-110.
- Hanafi, M. (2015). *Community Based Research panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama komunitas*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hidayat, S. (2021). Implikasi dan konsekwensi nilai-nilai local wisdom (kearifan lokal) dalam kepemimpinan di era globalisasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2113-2122.
- Huberman, M. &. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Koech, C. K., Ongugo, P. O., Mbuvi, M. T. E., & Maua, J. O. (2009). Community Forest Associations in Kenya: challenges and opportunities. *Kenya Forestry Research Institute*.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.
- Mahmudah, N. (2018). Pemberdayaan Pada Anak-Anak Gang Dolly Di Sma Artantika Surabaya Dengan Metode Asset Based Community Development. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 1(1), 17-29.
- Majale, M. (2008). Employment creation through participatory urban planning and slum upgrading: The case of Kitale, Kenya. *Habitat International*, 32(2), 270-282.
- McKnight, J. (2017). Asset-based community development: the essentials. In *AssetBased Community Development Institute*.
- Mohammed, Y. S., Mustafa, M. W., & Bashir, N. (2013). Status of renewable energy consumption and developmental challenges in Sub-Sahara Africa. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 27, 453-463.
- Moser, C. (2006). Asset-Based Approaches to Poverty Reduction in a Globalized Context. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1011176>
- Mutaqin, E. Z., Saputri, S. L., & Maulida, M. F. (2023). Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Digital Marketing Produk Sirup Jahe Kelompok Wanita "Tiara Tani" Di Desa Tanggeran. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2993-3006.
- Nair, M., Ariana, P., Ohuma, E. O., Gray, R., De Stavola, B., & Webster, P. (2013). Effect of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) on malnutrition of infants in Rajasthan, India: a mixed methods study. *PloS one*, 8(9), e75089.
- Narayan-Parker, D., & Patel, R. (2000). *Voices of the poor: Can anyone hear us?* (Vol. 1). World Bank Publications.
- Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 3(2), 91-103.
- Paramitha, S., & Bhaskara, G. I. (2020). Pengembangan Pariwisata di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 103.
- Parwata, I. W., Sutapa, I. N., Antarini, L., & Astara, I. W. W. (2023). PENGEMBANGAN KERAJINAN SENI UKIR DAN BANGUNAN TRADISIONAL BALI DI DESA SINGAPADU TENGAH. *Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 6(2), 122-126.
- Raharjo, T. (2011). *Seni kriya & kerajinan*. Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Rahmadanira, S. (2023). *Pemetaan Potensi Desa Dalam Pengembangan Usaha Bumdes Melalui Konsep Asset Based Community Development (Abcd) Di Desa*

- Ranga Kabupaten Enrekang. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE.
- Rahman, F., Dahlan, M., & Hefni, W. (2022). Pengembangan Lembaga Pendidikan Ekonomi Digital Berbasis Desa dalam Upaya Peningkatan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Desa Pasca Pandemi. *The 4th International Conference On University Community Engagement (Icon-Uce 2022)*, 4, 245-255.
- Rahmawati, A., Peachilia, I. P. P., Hanifah, D. S., & Humaedi, S. (2024). Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Cigadung: Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung. *Pekerjaan Sosial*, 23(1).
- Rini, H. S. (2012). Dilema keberadaan sektor informal. *Komunitas*, 4(2).
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset-based community development dalam program corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 112.
- Riyanto, F. X. E. A., & Adon, M. J. (2024). KESEIMBANGAN ALAM DAN MANUSIA: MENYIBAK NILAI-NILAI EKOLOGIS BUDAYA SUKU DAYAK KRIO BERDASARKAN PERSPEKTIF EKOLOGI THOMAS BERRY. *Jurnal BATAVIA*, 1(03), 145-158.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 87-96.
- Rusmaniah, R., Nugroho, D. A., Indriyani, P. D., & Putra, M. A. H. (2022). Partisipasi Perajin Dalam Pengembangan Seni Kerajinan Anyaman di Kampung Purun Berbasis Kearifan Lokal. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(1), 1-10.
- Santos, L. B. dos. (2024). Nature-based solutions in urban periphery communities in Brazil. *Societal Impacts*, 3, 100050. <https://doi.org/10.1016/j.socimp.2024.100050>
- Shetty, V., & Abhishek, N. (2024). Beneficiaries Behavioural Intention Towards Primary Agricultural Co-operative Credit Society-A Quantitative ABCD Analysis. *International Journal of Case Studies in Business, IT and Education (IJCSBE)*, 8(1), 71-114.
- Sholehah, C. A., & Pratama, L. D. (2024). Pendampingan kultur literasi dengan metode Asset Based Community Development (ABCD) terhadap mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 42-46.
- Sopannah, A., Bahri, S., & Ghozali, M. (2020). *Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Statistik, B. P. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(01), 1-14.
- Wibhisana, Y. P. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 31-45.
- Winarti, A., & Purwanti, E. Y. (2014). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

**Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial**

ISSN: 2620-3367 (Online) Vol. 7 No. 2 Desember 2024 Hal : 142 - 158

Available Online at [jurnal.unpad.ac.id/focus](http://jurnal.unpad.ac.id/focus)

---